

Penghapusan UWT di Tangan Presiden

BATAM - Penghapusan uang wajib tahunan (UWT) di permukiman yang gencar disuarakan Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam tergantung keputusan Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melaporkan kasus itu ke Presiden dan Badan Pengusahaan (BP) siap melaksanakan apapun keputusan presiden.

Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak bisa memastikan apakah uang wajib tahunan (UWT), terutama di kawasan permukiman, yang selama ini dipungut pemerintah akan dihapuskan atau tidak. Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan usulan warga untuk penghapusan UWT tersebut sudah disampaikan kepada Menko Perekonomian untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"BP Batam hanya menyampaikan fakta mengenai UWT, mengapa dan berapa tarif-tarifnya. Dihapus atau tidak itu bukan menjadi wewenang BP Batam tapi pemerintah pusat," kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Rabu (7/3).

Dalam rapat koordinasi di Jakarta kemarin, dijelaskannya bahwa untuk tarif UWT paling mahal adalah di wilayah Nagoya dengan sewanya sekitar Rp160.100 per meter persegi untuk jangka waktu 30 tahun. Jika dihitung per tahun tarifnya hanya Rp6 ribuan per meter persegi dan untuk wilayah sedang hanya Rp3 ribuan per meter persegi dan tarif paling murah seperti di Sekupang hanya sekitar Rp2.200 per meter persegi.

Menurut Keppres No. 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, semua lahan adalah milik negara dan hak pengelolaan lahan (HPL)-nya diserahkan kepada BP Batam. Terkait dengan proses pembelian dan ganti rugi lahan menurut dia terjadi pada masa itu. Saat ini hanya sedikit masyarakat yang memiliki hak milik atas lahan-lahan yang ada di Batam.

"Kenapa kita memungut UWT, karena BP Batam harus membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara," kata Lukita.

Begitu juga dengan terkait keinginan Pemko Batam yang meminta supaya daerah permukiman supaya tidak lagi dibebani dengan tarif UWT, Lukita mengatakan BP Batam hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Jika pemerintah pusat memutuskan untuk dihapus, tentu BP

Batam akan menjalankan itu. Namun jika pemerintah pusat tetap ingin memungut UWT maka BP Batam harus menjalankan aturan.

Persoalan UWT diakuinya menjadi salah satu pembahasan saat rapat koordinasi di Jakarta. Menko Perekonomian menurut Lukita hanya ingin mendapatkan gambaran fakta lapangan mengenai lahan yang ada di Batam. Daerah permukiman berapa banyak, bagaimana kategori dan tarifnya, fakta-fakta itu akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"Intinya kami hanya menjalankan aturan dari pemerintah pusat. Fakta-fakta mengenai UWT sudah kita sampaikan," jelasnya.

Lukita juga mengungkapkan selain UWT, pihaknya juga menyampaikan rencana pengembangan Batam kedepan. Sebagaimana masterplan selain terus terus mendorong industri yang sudah ada seperti galangan kapal, minyak dan gas pihaknya mengaku juga ingin menjadikan Batam sebagai pusat logistik regional dan digital ekonomi, industri Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), dan pariwisata.

Untuk mewujudkan itu BP Batam berencana akan membangun sejumlah infrastruktur seperti membangun terminal 2 dan terminal kargo di Bandara Hang Nadim dengan nilai investasinya Rp2,7 triliun.

"Kita sudah melakukan market sounding dari tanggal 28 Februari rencana pengembangan Hang Nadim dengan skema KPBU," jelasnya.

Lalu, pengembangan Pelabuhan Batuampar dengan investasi sekitar USD167 juta dan pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Tembesi senilai Rp400 miliar dengan skema KPBU.

Kemudian pembangunan proyek pelabuhan Tanjungsaub dengan nilai investasi sekitar USD4 miliar. Selanjutnya pengembangan proyek jembatan Batam-Bintan dengan investasi Rp 13 triliun. Target konstruksi pada 2019 dan target operasi 2023 yang tahapan tentu akan dibicarakan bersama dengan Gubernur Kepri.

Keenam, pembangunan proyek rumah susun yang dibutuhkan kurang lebih 300 tower dengan tinggi 10 lantai dengan desain rusunami dengan estimasi nilai investasi Rp7,2 triliun. "Terakhir adalah pembangunan LRT Batam dengan investasi Rp12,9 triliun," kata Lukita



Aktivitas reklamasi di Kaveling Melati, Sagulung, Rabu (7/3). PPNS DLH Batam diminta meninjau aktivitas perusahaan yang menimbun bakau.

Camat Minta DLH Tinjau Penimbunan Bakau

SAGULUNG – Camat Sagulung Reza Khadafi meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam segera turun meninjau proyek reklamasi yang menimbun hutan bakau di belakang Kaveling Melati dan Kaveling Kamboja, Kelurahan Seipelenggut, Sagulung.

Hal ini dilakukan menanggapi keluhan dan kekhawatiran warga atas dampak buruk yang akan timbul dari proyek reklamasi tersebut. “Jika nanti proyek terbukti punya izin silakan dilanjutkan. Tapi sebaliknya, jika belum ada izin ma-

ka aktivitas perusahaan harus dihentikan. Karena dampaknya jelas bagi lingkungan sekitar,” ujarnya, Rabu (7/3).

Pihaknya sudah melihat langsung aktivitas proyek reklamasi penimbunan hutan bakau tersebut. Reza melihat dampak yang akan terjadi pada masyarakat sekitar. Sebab jika lokasi hutan bakau yang menjadi lokasi resapan air ditimbun, tentu akan memicu terjadinya bencana banjir di lokasi sekitar. Terlebih apabila proyek reklamasi menutup ataupun mempersempit aliran sungai yang ada.

Ke hal 12))

Camat Minta...

(((Dari hal 9

Menurut dia, masalah ini harus segera ditindak lanjuti karena lokasi adalah daerah resapan air. "Jika masalah ini tidak cepat dicarikan solusi, kemungkinan akan jadi langganan banjir," katanya.

Pihak proyek juga hingga kemarin belum ada tanggapan apapun terkait persoalan itu. Meski sudah pernah dipanggil pihak kecamatan, perusahaan tetap tak mengindahkan pemanggilan itu. "Kami akan terus awasi. Kami berharap DLH segera turun meninjau lanjuti masalah reklamasi ini. Jika terbukti tidak ada izin, proyek itu harus disegel," kata Reza.

Dia menambahkan, belakangan ini cukup banyak proyek reklamasi yang bermasalah. Beberapa bulan terakhir, pihaknya sudah menghentikan empat proyek reklamasi dan pematangan

lahan. Hal ini karena semua proyek yang ada tidak mendapatkan izin dari instansi pemerintah terkait.

Selain karena perizinan, proyek juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar terutama penyempitan saluran drainase dan sungai. Sehingga masalah seperti ini harus ditangani secara kami serius sebelum berdampak buruk bagi masyarakat. "Pemerintah yang nantinya akan disalahkan, padahal dampak tersebut akibat dari proyek-proyek seperti ini," tegasnya.

Warga Kaveling Bukit Melati, Neli mengatakan warga tak setuju dengan aktivitas proyek reklamasi dikarenakan berdampak buruk bagi warga. "Kalau penimbunan itu dilanjutkan, rumah warga akan terkena banjir," ujarnya.

Jangan Mau Diintervensi Pihak Luar

PPK dan PPS Diminta Tahan Godaan dan Bekerja Secara Profesional

BATAM KOTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Said Sijaruddin berharap para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) mematuhi peraturan, dan jangan mudah diintervensi pihak luar dalam bekerja mensukseskan pesta demokrasi pada tahun 2019 mendatang.

"Selain itu, dalam bekerja harus profesional dan menjaga integritas lembaga penyelenggara Pemilu. Karena, sedikit saja kesalahan akan mencemarkan nama

baik lembaga penyelenggara Pemilu," ujarnya saat menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-

"Akan banyak nanti godaan, mulai dari koper berisikan uang, cek, dan bahkan berbagai macam kunci yang berharga,"

SAID SIJARUDDIN
Ketua KPU Provinsi Kepri

Kota Batam pada Pemilu 2019 di Hotel Harmoni One, Batam

Centre, Rabu (7/3).

Anggota PPK yang dilantik berjumlah 36 orang, dengan sebaran tiga orang di 12 kecamatan. Sedangkan anggota PPS yang dilantik berjumlah 192 orang, untuk 64 kelurahan se-Kota Batam.

Pengambilan sumpah disaksikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Ketua DPRD Batam Nuryanto, Kapolresta Bareleng Kombes Hengki, perwakilan Kejaksaan Negeri, Komisioner KPU dan Panwaslu, perwakilan

organisasi perangkat daerah (OPD) serta para camat.

Said menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang sangat berarti bagi masyarakat dalam peningkatan perekonomian, maupun masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. "Pada 2014 lalu, Batam kurang harmonis dalam Pemilu. Tapi saya yakin pada 2019 penyelenggara Pemilu dapat menahan godaan," ujarnya.

Ke hal 12))



Wali Kota Batam Muhammad Rudi memberi selamat kepada anggota PPK dan PPS usai pelantikan di Harmoni One Hotel, kemarin

Jangan Mau...

(((Dari hal 9

Menurut dia, godaan maupun intervensi dari luar cukup mengiurkan, bahkan dapat menghilangkan akal sehat jika tak kuat. Hal itu merupakan salah satu kunci kejujuran dan bakti anggota PPK dan PPS sebagai penyelenggara Pemilu. "Akan banyak nanti godaan, mulai dari koper berisikan uang, cek, dan bahkan berbagai macam kunci yang berharga," kata Said.

Ketua KPU Batam Agus Setiawan mengimbau seluruh ang-

gota PPK dan PPS yang baru saja dilantik untuk bekerja maksimal, dan memberikan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang. "Kepada semua anggota PPK dan PPS, bekerjalah secara maksimal dan berikan yang terbaik," kata Agus.

Tahap pertama yang akan dilakukan PPK dan PPS adalah pemutakhiran data pemilih, dan ini merupakan tahapan krusial bagi anggota PPK dan PPS yang baru masuk dalam lingkup KPU. "Selama enam bulan sekali kami

akan evaluasi. Jika tidak layak, maka akan kami berhentikan pada September ini," ujarnya.

Agus menjelaskan, jika PPK dan PPS tidak bisa bersinergi dengan camat dan lurah, maka dinyatakan gagal dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019. Pasalnya, anggota PPK harus bekerja sama dengan pihak kecamatan, dan PPS dengan pihak kelurahan. "Kami berharap kepada camat dan lurah, jangan biarkan PPK dan PPS bekerja sendiri. Mari rangkul untuk mensuk-

seskan Pemilu 2019," harapnya.

Sedangkan bagi anggota PPK dan PPS yang baru, segera beradaptasi dan belajar dengan yang lebih senior dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Apalagi saat ini peraturan Pemilu banyak yang berubah. "Mari kita sama-sama sukseskan Pemilu 2019, baik itu Pileg maupun Pilpres," katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga berharap agar Pemilu 2019 merupakan pentas politik yang bersih. "Mari

bekerja secara profesional. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya.

Dia menambahkan, jika ingin pemimpin yang benar, baik itu Presiden maupun Gubernur, penyelenggara Pemilu harus menjaga integritas lembaga dan bekerja secara profesional dan tidak berpihak. "Saya ingin Batam menjadi contoh yang baik untuk daerah lain, jangan menjadi contoh yang jelek," kata Rudi.

● romi kurniawan

● tommy purniawan

Tak Ingin Warga Kehilangan Hak Pilih

BATAM KOTA – Pemko Batam mempercepat pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) agar bisa selesai sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, dan kami bisa mencapai target penyelesaian pencetakan e-KTP,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam Centre, Rabu (7/3).

Pemerintah daerah tidak ingin ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena belum memiliki e-KTP yang menjadi syarat ikut Pemilu. Hingga saat ini Pemko Batam telah mencetak sekitar 61 ribu lembar e-KTP, namun masih terdapat ribuan e-KTP yang belum dicetak. “Informasi yang saya terima sudah 61 ribu keping e-KTP yang sudah selesai dicetak,” ujarnya.

Pemko Batam telah mene-

rima tambahan 16.000 blangko eKTP untuk mencetak data kependudukan masyarakat. Semua operator tengah bekerja dan bergesa menyelesaikan pencetakan 16 ribu blangko yang baru datang tersebut.

Amsakar berharap masyarakat bersabar menunggu pencetakan e-KTP, terutama di kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pencetakan. Ia juga menjamin masyarakat tidak akan terkendala membuat e-KTP selama semua dokumen pendukung dilengkapi.

Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam Said Khaidar menyatakan, pihaknya tengah menggesa pencetakan 16 ribu e-KTP untuk Kecamatan Sagulung dan Batam Kota. “Seluruh operator lembur agar bisa menyelesaikan pencetakan,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan akan



KORAN SINDO BATAM/APRIZY ADITYA

menyelesaikan percetakan e-KTP dalam waktu 14 hari kerja agar penumpukkan pengajuan e-KTP dari kecamatan lain dapat segera diselesaikan juga. “Setelah Kecamatan Batam Kota selesai, tambahan blangko e-KTP nantinya akan dialihkan ke Sagulung,” ujarnya, kemarin.

Said menambahkan, sebanyak 13.000 pengajuan e-KTP di Sagulung tengah menunggu untuk dicetak. Jumlah tersebut pun hanya estimasi saja. Sebab Disdukcapil Batam hanya mencatat data yang lebih dulu terekam di sistem. Sedangkan permohonan e-KTP serta per-

ekamanan data penduduk bertambah setiap harinya. “Selain data penduduk yang terus bertambah, kendala pun ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang enggan memberikan seluruh kebutuhan blangko e-KTP,” katanya.

Warga mengurus dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Batam, Sekupang, Rabu (7/3).